

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tentang hasil penelitian di lapangan terhadap Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Desa Kelimado, peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada dimana program bantuan tersebut benar - benar diperuntukkan bagi masyarakat yang tergolong berpenghasilan rendah dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dimana dari alokasi anggaran untuk 12 unit rumah layak huni yang direncanakan akan dibangun, semuanya telah berhasil dibangun sampai dengan selesai dan telah ditempati oleh keluarga penerima bantuan tersebut.

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari Pemerintah Desa, Toko Adat dan Tokoh Masyarakat yang diwujudkan melalui kegiatan musyawarah yang berakhir dengan pengalokasian anggaran guna pembangunan rumah layak huni bagi keluarga yang belum memiliki rumah yang layak di Desa Kelimado serta pemantauan secara berkala oleh Tim Pelaksana Kegiatan sehingga tidak terjadi kendala yang tidak dapat diselesaikan.

Selain itu, komitmen yang luar biasa juga ditunjukkan oleh Keluarga Penerima Bantuan Rumah Layak Huni itu sendiri yang dengan segala keterbatasan dan kekurangannya mampu berswadaya untuk menyelesaikan pembangunan rumah layak huni untuk dapat ditempati oleh keluarga mereka.

Meskipun program ini berhasil diimplementasikan secara baik di Desa Kelimado, namun terdapat juga beberapa kendala yang menghambat penyelesaian program bantuan rumah ini di Desa Kelimado, yaitu terdapat ketidaksesuaian standar ukuran bangunan yang ditetapkan dengan yang dikerjakan oleh penerima bantuan dimana ukuran yang dibangun jauh lebih besar daripada yang direncanakan. Secara kasat mata, sebenarnya hal ini merupakan hal yang baik, namun tentu saja hal ini memiliki dampak pada jumlah biaya swadaya yang harus dikeluarkan oleh penerima bantuan akan menjadi lebih besar daripada yang seharusnya sehingga dikhawatirkan penyelesaian pembangunan rumah layak huni akan terlambat.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### **6.2.1 Bagi Pemerintah Desa Kelimado**

- a) Melakukan koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagekeo selaku dinas teknis terkait program bantuan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar masyarakat Desa Kelimado yang belum memiliki rumah layak huni juga bisa mendapatkan bantuan rumah layak huni yang bersumber dari Dana Pemerintah Pusat apabila anggaran dari Dana Desa belum cukup sehingga semakin banyak jumlah unit rumah layak huni yang dapat dibangun.
- b) Melakukan pendataan kembali keluarga miskin yang belum memiliki rumah layak huni di Desa Kelimado sehingga dapat dialokasikan

kembali anggaran untuk membangun rumah layak huni bagi keluarga miskin tersebut.

- c) Memastikan keluarga penerima bantuan rumah layak huni mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan bagi penerima bantuan rumah layak huni sehingga tidak terjadi kendala maupun masalah yang dapat menghambat penyelesaian program bantuan rumah layak huni tersebut.

#### **6.2.2. Bagi Masyarakat Desa Kelimado**

- a) Tetap berpartisipasi dalam setiap musyawarah terkait penerima program bantuan rumah layak huni sehingga keluarga penerima program bantuan tepat sasaran.
- b) Menaati ketentuan yang berlaku dalam program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah apabila menerima bantuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ramdhani & Muhammad Ali Ramdhani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik : Universitas Galuh Ciamis*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Agus Suryono. (2018). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98–102. <https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>
- Andi Misna. (2015). Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *JAP : Universitas Mulawarman*, 3(2), 521–533.
- Andi Mulyadi. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Sukabumi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(4). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Anisa Ismi. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Long Kali. *Ilmu Pemerintahan*, 9(2).
- Anita Mustika Dewi & Indah Prabawati. (2013). Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun. *Publika*, 1(2). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/2577/5630>
- Ardial. (2014). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. PT Bumi Aksara.
- Arikunto Suharsimi. (1992). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Aslinda. (2023). *Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan*. K-Media.
- Awan Abdoellah dan Yudi Rusfiana. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Budi Winarno. (2008). *Kebijakan Publik*. Buku Kita.
- Budi Winarno. (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS.
- Depkes RI. (2002). *Ceklist Penilaian Rumah Sehat*.
- Dian Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13–25.

- Elih Yuliah. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 3o(2), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Faishal Luthfianwar. (2018). *Implementasi Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Semarang Tahun 2016*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Hasan M. Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Hotmoko Tumanggor, et, all. (2018). Penerapan Metode VIKOR Dalam Penentuan Penerima Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni. *Jurikom : Jurnal Riset Komputer*, 5(1), 71–78. <http://ejournal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/jurikom%7CPage%7C71>
- Isye Agindawati. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan. *Jurnal Inspirasi : BPSDM Provinsi Jawa Barat*, 10(1), 98–105. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.68>
- Juan Riko Bawenti, et, all. (2019). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Kurang Mampu Didesa Wasilei Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Eksekutif: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–10.
- Matthew Miles, M. H. dan S. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd ed.). UI Press.
- Rahmawati Zania. (2018). *Efektivitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH) Di Kota Tegal Tahun 2017*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Ravyansah, et, all. (2022). *Kebijakan Publik*. Global Eksekutif Teknologi. Riant Nugroho. (2009). *Publik Policy*. Elex Media Komputindo.
- Rulinawaty Kasmad. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
- Sahya Anggara. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Sholih Muadi, et, all. (2016). Concept and Theory of Public Policy Formulation. *Jurnal Review Politik*, 06(2), 195–224.
- Tendean Elsy Desyra, et, A. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompasso Kabupaten Minahasa. *JAP : UNSRAT*, 8(110), 35–45.
- Urip Santoso. (2014). *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*. Kencana Prenada

Media Group.

Yosef Gede Sutmasa. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36.  
<https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>